

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *good corporate governance*. Hubungan keagenan adalah kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Darmawati, dkk (2004), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principall/investor*) dan pengendalian (agen/manajer). Kepemilikan diwakili oleh investor dalam mendelegasikan kewenangan kepada agen (manajer) untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut akan memperoleh keuntungan yaitu bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor.

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor) dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan sesuatu kecurangan untuk kesejahteraan agen (Darwis, 2009).

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer, sehingga muncullah konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen), di mana pemilik lebih tertarik untuk memaksimalkan *return* dan harga sekuritas dari investasinya, sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimalkan kompensasinya. Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan manajer diharapkan dapat meminimumkan konflik antara kedua kepentingan tersebut. Hal ini yang akan mendorong munculnya asimetri informasi antara manajemen (agen) dengan pemilik (*principal*) dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan *earnings management* dalam rangka mengelabui pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dalam hal ini apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham, maka manajer akan cenderung melakukan kecurangan dengan melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan keuntungannya sendiri.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

2. Corporate Governance

Menurut *Organization Economic Cooperation and Development* (OECD) berpendapat bahwa *corporate governance* merupakan struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* meliputi (<http://www.fcgi.or.id/>).

1. Keadilan (*Fairness*)

Menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya.

2. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan mengenai informasi kinerja perusahaan, baik tepat waktu maupun akurasi. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterapkan memberikan manfaat diantaranya yaitu:

1. Meminimalkan *agency costs* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen.
2. Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal.
3. Meningkatkan citra perusahaan.
4. Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah.

5. Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stake holder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

Di bawah ini merupakan proksi dari *corporate governance* yaitu:

- a. **Kepemilikan Manajerial**

Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer dapat sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Maka diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer. Kepemilikan manajerial yang dimaksud adalah jumlah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) Faisal (2005).

Menurut Itturiaga dan Sanz (2000) dalam Anindhita (2010) struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymetry information approach*). Pendekatan keagenan menganggap kepemilikan manajerial sebagai

sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (*claim holder*) terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

b. Kepemilikan Institusional

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Secara teori menyebutkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap kondisi perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan manajer serta meminimalisir penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen. Jadi semakin tinggi, kepemilikan saham oleh institusi akan semakin meningkatkan kinerja keuangan. Menurut Darwis (2009) kepemilikan institusional itu sendiri merupakan besarnya kepemilikan saham oleh investor institusi dibanding dengan total

saham perusahaan tersebut. Jumlah saham yang beredar adalah jumlah saham yang dikeluarkan oleh investor.

Sedangkan menurut Tarjo (2008) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi (lembaga) seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional menurut Shien (2006) dalam Winanda (2009) adalah kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer, sehingga dapat menurunkan kinerja keuangan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan yaitu memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi dan memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas

yang terjadi di dalam perusahaan. Pengawasan tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham.

c. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki memiliki peranan penting dalam memonitor perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya. Peran komisaris independen diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN. Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi (<http://www.fcgi.or.id/>).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) di dalam peraturan Pencatatan Efek No.1a tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1a menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selanjutnya dalam angka 2 menentukan persyaratan komisaris independen yang melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Seberapa besar pengaruh kinerja komisaris independen pada dewan komisaris apabila komposisi komisaris independen 30% melawan komisaris yang tidak independen sebesar 70%. Sekalipun komisaris independen dapat melakukan *dissenting*, namun tujuan

diadakan komisaris independen tidak hanya sekedar untuk *dissenting*, namun tentu diharapkan mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan dewan komisaris.

(<http://re-searchengines.com/badriyahamirudin.html>)

Dalam penelitian ini proporsi dewan komisaris independen diukur berdasarkan jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah komisaris yang ada dalam susunan pada perusahaan sampel (Darwis, 2009). Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada manajemen (Surya, 2008 dalam Daniela, 2010). Untuk menjamin pelaksanaan *good corporate governance* diperlukan anggota dewan komisaris yang memiliki integritas, kemampuan tidak cacat hukum dan tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham pengendali (mayoritas) baik secara langsung maupun tidak langsung atau biasa disebut komisaris independen. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya, 2008 dalam Daniela, 2010). Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan dan atau masukan yang diberikanya demi kepentingan perusahaan.

Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama yaitu meliputi (Surya, 2008 dalam Daniela, 2010):

- a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*)
Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
- b. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*).
- c. Memonitor pelaksanaan *governance* dan mengadakan perubahan. Komisaris independen harus melaksanakan

transparansi (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) atas hal ini.

- d. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas dalam perusahaan. Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

d. Komite Audit

Supriyono (1998) dalam Susiana dan Herawaty (2006), berkaitan dengan keberadaan komite audit, komite audit adalah suatu badan yang dibentuk di dalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Komite audit yang bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Siallagan, 2006).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam rangka upaya mewujudkan praktek *good corporate governance*. Pemegang saham mengangkat dewan komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Selanjutnya dewan komisaris membentuk komite

audit yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap manajemen. Oleh karena itu komite audit berperan sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian perusahaan. Berkaitan dengan peran komite audit tersebut, FCGI membagi tanggungjawab komite audit pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), tanggungjawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah menggambarkan kondisi keuangan, hasil usaha, dan rencana serta komitmen jangka panjang perusahaan sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), tanggungjawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika yang ada. Selain itu komite audit juga bertanggungjawab untuk mengawasi perbedaan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.
3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Kontrol*), tanggungjawab komite audit dalam bidang *corporate kontrol* adalah memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh internal auditor sehingga

komite audit diharuskan memahami risiko yang mungkin muncul serta memahami sistem pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Komite audit beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Salah satu dari anggota komite audit merupakan komisaris independen yang sekaligus bertindak sebagai ketua komite agar tercipta independensi dalam memberikan pendapat. Sedangkan anggota komite audit lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dan tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan perusahaan, direktur, komisaris atau pemegang saham utama.
- b. Anggota komite audit haruslah individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan kegiatan manajemen serta memiliki pengalaman terhadap pengawasan manajemen. Hal ini bertujuan agar nilai integritas dan obyektivitas dapat tercipta dalam merekomendasi penyusunan laporan keuangan.

Mc Mullen (1996) dalam Siallagan (2006) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan.

Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui:

1. pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum.
2. mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu:
 - (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat
 - (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat
 - (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

e. Dewan Direksi

Wikipedia (2011) direktur (dalam jumlah jamak disebut dewan direksi) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Perusahaan. Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Para direktur memiliki masa jabatan selama tiga tahun. Seorang direktur yang telah menyelesaikan masa jabatannya memenuhi syarat untuk dipilih kembali oleh pemegang saham. Penyebutan direktur dapat bermacam-macam yaitu dewan manajer, dewan gubernur atau dewan eksekutif. Di Indonesia pengaturan terhadap

direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggungjawab direksi. Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan sebagai direktur dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan ke ada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Tanggungjawab dari direktur kepada pihak ketiga dan hukum ditentukan dari jenis perusahaan yang didirikan (Firma, Persekutuan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT).
5. Tiap transaksi atau tindakan yang berpotensi untuk memberi pengaruh signifikan pada status keuangan perusahaan, kewajiban, strategi usaha serta reputasi perusahaan.
6. Investasi dalam proyek yang bernilai lebih dari 300 juta bath.
7. Eksekusi dari setiap kontrak yang tidak berkaitan dengan bisnis biasa perusahaan serta kontrak apapun yang berkaitan dengan bisnis biasa perusahaan yang sifatnya material.

8. Perubahan signifikan dalam kebijakan yang berhubungan dengan sistem manajemen dan pengawasan keuangan.
9. Penentuan dan pertimbangan atas pemberian kuasa untuk menyetujui kepada CEO, *Executive Officers*, *Chief Operating Officer* dan *Vice Presidents* dari setiap unit usaha.
10. Pembayaran interim deviden.

Selain proksi *corporate governance*, ukuran perusahaan juga merupakan variabel independen dalam penelitian ini, berikut merupakan penjelasan mengenai ukuran perusahaan:

f. **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dicerminkan dengan total aset yang menggambarkan seberapa besar dana yang dikelola dan kompleksitasnya. Total aset juga menggambarkan hak & kewajiban serta permodalan perusahaan. Sesuai peraturan BAPEPAM No.11/PM/1997, disebutkan bahwa kategori perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aktiva lebih dari Rp 100.000.000.000,00. Sedangkan perusahaan kecil dan menengah total aktiva tidak lebih dari Rp 100.000.000.000,00. Secara umum perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Selain itu, perusahaan yang besar memiliki kemampuan dalam

menghasilkan laba lebih besar daripada perusahaan kecil, sehingga modal yang dibutuhkan juga besar. Oleh karena itu dengan tingkat laba yang besar maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan akan semakin bagus.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang tampak dalam nilai total aktiva dengan diberi simbol *size* (Darwis, 2009). Ukuran perusahaan (*firm's size*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Ukuran-ukuran kinerja akan mengidentifikasi efektivitas penggunaan aktivitas oleh perusahaan dan berbagai rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja akan memberikan gambaran yang memadai (Helfert, 1996 dalam Sulistyawati 2010).

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari suatu proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Salah satu parameter kinerja tersebut adalah laba. Laba bagi perusahaan sangat diperlukan karena untuk kelangsungan hidup perusahaan. Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini dapat terlaksana jika perusahaan mempunyai sumber daya. Laba dapat memberikan sinyal yang positif mengenai prospek perusahaan di masa

depan tentang kinerja perusahaan dengan adanya pertumbuhan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan sinyal yang positif mengenai kinerja perusahaan. Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kinerja perusahaan juga baik, karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan (Sibarani, 2010).

Menurut Munawir (2000) kinerja perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan oleh perusahaan. Manfaat penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu (biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi) yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Munawir (2000) “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan”. Maka dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan tergambar di dalamnya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan.

Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan. Jadi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran atau tolok ukur tertentu. Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan.

Berikut ini adalah beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan Ang (1997) dalam Ira (2010) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.

2. Rasio Aktivitas

Rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan

secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset maupun laba bagi modal sendiri. Menurut Ang (1997) dalam Ira (2010), rasio profitabilitas dibagi menjadi enam yaitu: *Gross Profit Margin (GPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Operating Return On Assets (OPROA)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Operating Ratio (OR)*.

4. Rasio Solvabilitas (*Leverage*)

Financial leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%.

5. Rasio Pasar

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proksi *return on equity* (ROE) dimana rasio tersebut termasuk dalam rasio profitabilitas. *Return on Equity (ROE)* adalah rasio yang merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham (baik secara langsung maupun dengan laba yang

ditahan). ROE sangat menarik bagi pemegang saham maupun para calon pemegang saham dan manajemen. ROE sering disebut dengan *rate of return on net worth*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih dipotong dengan pajak atau EAT. Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini atau bagian dari total profitabilitas yang dialokasikan ke pemegang saham. Pemegang saham mempunyai klaim residual (sisa) atas keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan dipakai untuk membayar bunga hutang, kemudian saham preferen, baru kemudian (jika terdapat sisa) diberikan ke pemegang saham biasa (<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=1650>).

ROE menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. ROE adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan berapa persen perolehan laba bersih bila di ukur dari modal pemilik, artinya ROE digunakan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan *return* yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan investor (<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=1650>). *Return on equity* (ROE) adalah hasil bagi laba bersih perusahaan terhadap total ekuitas (Husnan, 2001).

2.3 Pengembangan Hipotesis

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen) dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan (ROE) dan pengembangan hipotesis.

1. Kepemilikan Manajerial

Beberapa bukti empiris mengakui bahwa pemberian proporsi saham pada manajemen adalah suatu pendekatan yang efektif untuk mengurangi kecenderungan manajer berperilaku mementingkan diri sendiri. Jansen dan Mackling (1976) dan Mehran (1992) menyebutkan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat, maka dengan adanya hal tersebut dapat menurunkan kinerja keuangan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenen diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Hal ini merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan, jika laba suatu perusahaan meningkat maka kinerja keuangan perusahaan tersebut juga akan semakin baik.

Dalam hubungannya dengan keagenan, Crutchley dan Hansen (1989), Bathala et.al (1994) dalam Faisal (2004) menyimpulkan bahwa *level* kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan *opportunistic* yang dapat menurunkan kinerja perusahaan, sehingga dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham untuk bertindak demi kepentingan perusahaan yaitu meningkatkan kinerja keuangan.

Berlawanan dengan Winanda (2009) dan Anindhita (2010) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan dikarenakan keberadaan manajer dan pemegang saham kurang memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis:

H₁ : kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE).

2. Kepemilikan Institusional

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan. Pozen (1994) Faisal (2004) mengungkapkan beberapa metode yang digunakan oleh pemilik institusional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial.

Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga manajemen akan lebih fokus untuk meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pension dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan (*source of power*) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Selain itu, struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu mengoptimalkan laba, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan semakin bagus.

Kinerja keuangan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat *monitoring* yang efektif, karena semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga kinerja keuangan dapat terkontrol dengan baik. Brous dan Kini (1994) dalam Faisal (2004) menyatakan bahwa ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. Sehingga berdampak pula pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka kinerja keuangan suatu perusahaan juga akan semakin baik. Brickely et.al (1988) dalam Faisal (2004) menemukan bahwa adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, Pound (1988) menemukan bahwa kepemilikan institusional justru tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis:

H₂ : kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE).

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut Barry Reiter dalam Herwidayatmo (2000) menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat membantu memberikan kelangsungan dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala dapat melakukan *review* atas strategi tersebut. Hal tersebut akan dapat membantu memberikan *benefit* yang tinggi bagi perusahaan sehingga

dapat meningkatkan laba perusahaan dan berdampak pada kinerja keuangan yang semakin bagus.

Darmawati (2004) menemukan bahwa perusahaan yang tidak curang memiliki dewan komisaris yang prosentase anggota luarnya lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang curang. Kemungkinan dilakukannya kecurangan laporan keuangan akan menurun sejalan dengan peningkatan pengalaman dan keahlian dewan. Berkaitan dengan independensi, dewan komisaris eksternal yang merupakan bagian dari komisaris perseroan secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan *intern* dalam perusahaan. Demikian juga independensi dewan komisaris semakin independen dewan komisaris, akan semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Chtourou et al. 2001 dalam Antonio, 2008). Oleh karena itu, komisaris independen seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja keuangan yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Fama dan Jansen (1983) dalam Faisal (2004) menyatakan bahwa pihak independen akan lebih efektif dalam memonitor manajemen, selain itu juga dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan, salah

satunya adalah peningkatan laba. Sehingga kinerja keuangan akan meningkat. Pendapat lain dari Sam'ani (2008) dan Wulandari (2006) menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan dikarenakan para pemegang saham belum percaya terhadap dewan komisaris independen tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perusahaan mereka sehingga para pemegang saham belum melihat segi positif dari adanya dewan komisaris independen, sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis:

H₃ : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE).

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula laba yang dihasilkan sehingga kinerja keuangan akan meningkat (Ningsaptiti, 2010).

Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai

kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut harus melaporkan kondisinya lebih akurat, sehingga laba yang dihasilkanpun akan maksimal.

Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Perusahaan besar dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba daripada perusahaan kecil. Bagi perusahaan yang stabil biasanya dapat memprediksi jumlah keuntungan di masa yang akan datang karena tingkat kepastian laba yang tinggi. Sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang semakin bagus. Menurut Darwis (2009), Daniela (2010) dan Jati (2009) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya bagi perusahaan yang belum mapan, besar kemungkinan laba yang diperoleh juga belum stabil karena kepastian laba lebih rendah (Sembiring, 2008). Sedangkan menurut Susilawati (2010) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh dengan kinerja keuangan.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis:

H₄ : ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE).

2.4 Kerangka Pemikiran

Penerapan *corporate governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia. Peran dan tuntutan para investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *corporate governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Untuk itu penerapan *corporate governance* di Indonesia sangat penting, karena prinsip *corporate governance* dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan di Indonesia dapat bersaing secara global. Adanya sistem *corporate governance* para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan memperoleh *return* atas investasinya karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor.

Dari adanya hal tersebut, maka dalam penelitian ini kinerja keuangan dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial sesuai dengan Bathala et.al. (1994) dalam Faisal (2004) menyimpulkan bahwa *level* kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer akan menurunkan

kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan mementingkan diri sendiri dengan demikian akan menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham sehingga kinerja keuangan akan meningkat.

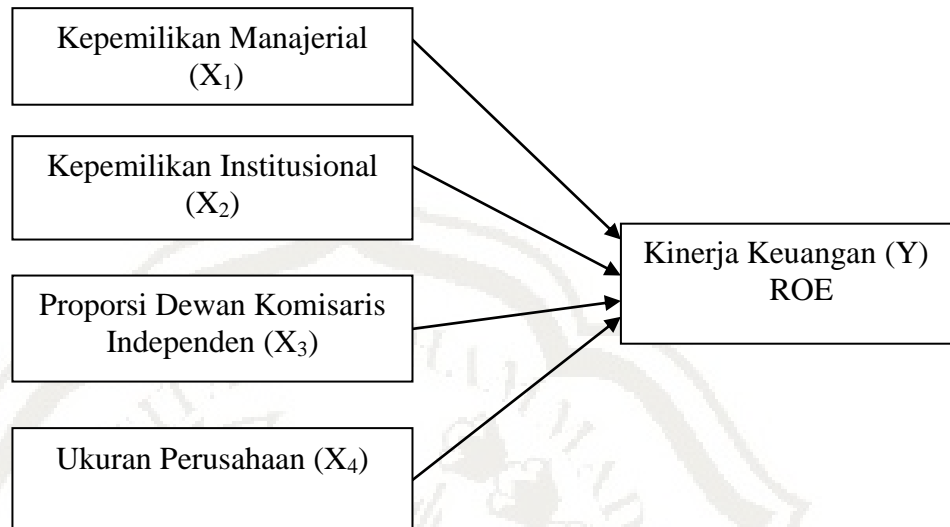
Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. Sehingga berdampak pula pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan semakin baik. Brickely et.al (1988) dalam Faisal (2004) menemukan bahwa adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan dipengaruhi oleh komisaris independen menurut Darmawati (2004) menemukan bahwa perusahaan yang tidak curang memiliki dewan komisaris yang prosentase anggota luarnya lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang curang. Kemungkinan dilakukannya kecurangan laporan keuangan akan menurun sejalan dengan peningkatan pengalaman dan keahlian dewan. Berkaitan dengan independensi, dewan komisaris eksternal yang merupakan bagian dari komisaris perseroan secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan

manajemen karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan *intern* dalam perusahaan. Demikian juga independensi dewan komisaris semakin independen dewan komisaris, akan semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Chtourou et al.2001 dalam Antonio, 2008).). Oleh karena itu, komisaris independen seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja keuangan yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Sedangkan kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, faktor ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Perusahaan besar dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba daripada perusahaan kecil. Bagi perusahaan yang stabil biasanya dapat memprediksi jumlah keuntungan di masa yang akan datang karena tingkat kepastian laba yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan akan meningkat. Menurut Maman, dkk (2006), Jati (2009) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Di bawah ini merupakan gambar model penelitian:



Gambar 2.1. model penelitian